



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI KELURAHAN
SELENSEN KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



DI SUSUN OLEH :

ALDA FITRI ANANDA
11627203903

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir."* yang ditulis oleh:

Nama : ALDA FITRI ANANDA

NIM : 11627203903

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah MA

NIP. 1941025 2003 12 1 002.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI KELURAHAN SELESEN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" yang ditulis oleh :

Nama : ALDA FITRI ANANDA

NIM : 11627203903

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

Sekretaris

Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I

Dr. Hj. Hertina, M.Ag

Penguji II

Lovelly Dwina Dahren, SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 10741006 200501 1 005

ABSTRAK

Alda Fitri Ananda “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.”

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, sedangkan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Namun di PT. Multiguna Lestari Abadi pengelolaan limbah B3 belum berjalan efektif, bahwa masih terjadi pembuangan limbah B3 kedalam sungai yang mengakibatkan banyaknya ikan mati dan pencemaran lingkungan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan apa faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas Peraturan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan faktor penghambat efektivitas dari peraturan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan, yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian dari efektivitas peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan efektif, karena Sungai Reteh Kecamatan Kemuning merupakan salah satu sungai yang terkena dampak pembuangan limbah oleh PT. Multiguna Lestari Abadi sehingga mengakibatkan banyaknya ikan-ikan yang mati, gatal-gatal bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah; (i) kurangnya sarana dan prasarana; (ii) kurangnya kesadaran PT. Multiguna Lestari Abadi; (iii) kurangnya pengawasan oleh dinas terkait terhadap pengelolaan limbah bahan bakar berbahaya; (iv) faktor pendukung efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya; (a) memperketat pengawasan limbah B3; (b) melakukan perbaikan terhadap sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3; (c) pentingnya pengetahuan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yaitu, Ayahanda Hendra Atmaja dan Ibunda Erna Yanti, serta Alm. Kakek dan Almh. Nenek selaku wali bagi penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Serta tidak lupa pula Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mhd. Kastulani SH.,M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan masukan dalam menjalani proses perkuliahan
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membimbing, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syar'iah Dan Hukum sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dan sahabat penulis yang selalu menyemangati, membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

ALDA FITRI ANANDA
NIM. 11627203903

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning	17
1. Sejarah Kelurahan Selensen	17
2. Kondisi Geografi dan Demografi.....	19
B. Gambaran Umum PT. Multiguna Lestari Abadi.....	25
C. Struktur Organisasi PT. Multiguna Lestari Abadi	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas Hukum	27
B. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	32
C. Lingkungan Hidup	36
1. Manusia dan Lingkungan	36
2. Manusia dan Lingkungan	36
3. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	37



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	41
E. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	51
B. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	12
Table II.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning..	20
Table II.2 Sarana Rumah Ibadah.....	22
Table II.3 Sarana Pendidikan	22
Table II.4 Sosial Ekonomi	24
Tabel II.5 Struktur Organisasi PT. Multiguna Lestari Abadi.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Demikian pula manusia, masyarakat, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pergaulan hidup sehari-hari.²

Hukum merupakan pelembagaan aturan, ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu ke pada individu yang lain, dan budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau sebuah negara dalam menjaga kemakmuran masyarakat yang berdampak pada lingkungan sekitar dan lain-lain oleh perubahan sosial.³

¹ Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 1.

² *Ibid.*, h. 5.

³ Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 71.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia.

Adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Disatu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.⁴ Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemari lingkungan hidup untuk kepentingan bersama. Dengan ketentuan tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maka dari itu segala kebijakan, dan tindakan pemerintahan maupun pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan dibawah undang-undang yang

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Cinstitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan.⁵ Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang.

Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terlepas dari ancaman dan pencemaran disebabkan buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional. Adapun Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri kelapa sawit yang membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidak jujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

⁵ Ibid., h. 91.

⁶ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, (PT Alumni, 2008), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran air adalah, kerusakan yang terjadi pada air yang disebabkan adanya perubahan kandungan dalam air baik itu di danau, sungai maupun laut. Perubahan kondisi air tersebut melewati batas air yang layak untuk digunakan. Terkait pencemaran air banyak faktor atau penyebabnya, salah satunya yaitu disebabkan oleh limbah industri.⁹ Selanjutnya Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Mengenai limbah B3 dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mengatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

⁸ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 39.

⁹ *Ibid.*, h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.¹⁰

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menjelaskan bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pertumbuhan industri di Indonesia berjalan sangat pesat, selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun bagi ekosistem yang ada di sungai.¹¹

Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi manusia. Air bermanfaat sebagai sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu dijaga dan dipelihara kualitas air tersebut agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.

¹¹ *Ibid.*, h. 196.



hidup lainnya.¹²

Adapun yang menjadi sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa daerah di Indonesia, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri, banyak perusahaan industri membuang limbah industrinya pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah dan aliran sungai.¹³

Meskipun pengelolaan limbah sudah di atur dan di tegaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sayangnya sebagian besar limbah di Indonesia masih di buang secara sembarangan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah tidak adanya kebijakan pengelolaan limbah yang terintegrasi antara pencegahan dan pengendalian dan tidak diterapkannya prinsip hierarki pengelolaan limbah secara konsisten.¹⁴

Terkait dengan kasus pembuangan limbah yang di jelaskan diatas, hal inilah yang terjadi saat ini pada PT. Multiguna Lestari Abadi yang terletak di Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dimana PT. tersebut telah membuang limbah industrinya ke aliran Sungai Reteh yang berada di sekitaran pemukiman warga, yang mana sebagian besar warga masih menggunakan sungai tersebut sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kegiatan mencuci, mandi, dan ada juga sebagian digunakan untuk dikonsumsi.

¹² P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 47.

¹³ Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 42.

¹⁴ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFCET, 2016), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh PT. tersebut dampak yang ditimbulkan yakni terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat, seperti yang dialami beberapa dari warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai tersebut mengalami gatal-gatal pada kulit, menyebabkan ekosistem yang ada di sungai tersebut terganggu, seperti ikan dan udang banyak yang mati, warna air sungai menjadi keruh hingga berwarna kehitaman sehingga warga kehilangan sumber air bersih dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi, dan juga sesekali menimbulkan bau yang menyengat sehingga mengganggu indra penciuman warga sekitar. Dengan demikian dapat dilihat bahwa limbah yang dibuang ke air atau sungai tersebut belum dikelola secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan sungai atau air reteh tersebut tercemar.

Melihat berbagai masalah yang ditimbulkan di atas dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut belum cukup efektif menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, khususnya masalah pembuangan limbah. Padahal dalam Pasal 199 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan”

“Setiap orang yang melakukan dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup wajib melaksanakan :

1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup”¹⁵

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, pasal 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, serta faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji masalah tentang pelaksanaan pengelolaan limbah industri yang berdampak pada tercemarnya Sungai Reteh yang terdapat di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait masalah tersebut dengan mengangkat judul: **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang penulis singgung dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi masalah yaitu pada efektivitas Pengelolaan Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1.) Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir,
- 2.) Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- 1.) Adapun kegunaan penelitian ini antara lain dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan

HaCipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

- 2.) Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah pada PT. Multiguna Lestari Abadi di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 3.) Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta untuk mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga dapat menghasilkan suatu pengetahuan baru.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder. Dan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,

¹⁶ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu peneliti yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dilapangan. Adapun lokasi Penelitian dilakukan di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwasanya perusahaan ini belum mengelola limbah sesuai dengan aturan PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan dan karyawan PT. Multiguna Lestari Abadi, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terletak di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Objek dari penelitian ini adalah efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT. Multiguna Lestari Abadi di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir..

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan dan karyawan PT. Multiguna Lestari Abadi, tokoh masyarakat serta masyarakat Kelurahan Selensen. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 1 orang Pimpinan PT. Multiguna Lestari Abadi beserta 4 orang karyawan PT. Multiguna Lestari Abadi dan 5 orang tokoh masyarakat Kelurahan Selensen, serta 40 orang masyarakat.

Tabel 1. 1.
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Metode Sampel
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	1	1	100%	Total Sampling
2	Pimpinan dan karyawan PT. Multiguna Lestari Abadi	95	5	5%	Random Sampling
3	Tokoh Masyarakat Kelurahan Selensen	5	5	100%	Total Sampling
4	Masyarakat Kelurahan Selensen	4.733	40	1%	Random Sampling
	Jumlah	4.834	51		

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian dengan cara observasi pengamatan, wawancara atau interview langsung kepada responden terpilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari dokumen resmi dalam bentuk laporan catatan, dan dokumen melalui tempat kantor peneliti serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal terhadap fenomena-fenomena untuk mendapatkan secara nyata tentang apa yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan²⁰ wawancara dilakukan kepada 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 1 orang

²⁰ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Pimpinan PT. Multiguna Lestari Abadi beserta 4 orang karyawan PT. Multiguna Lestari Abadi dan 5 orang tokoh masyarakat Kelurahan Selensen.

c. Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis angket dibagikan kepada 40 orang masyarakat kelurahan Selensen.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tatanan yang di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Adapun yang penulis gunakan Dalam penarikan kesimpulan yaitu menggunakan metode deduktif.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran Kelurahan selensen dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

BAB III : TUNJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning

1. Sejarah Kelurahan Selensen

Selensen merupakan salah satu Kelurahan dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Indonesia, yang berbatasan dengan provinsi jambi dan Indragiri hulu riau, adapun di antara dua belas desa tersebut yaitu Kelurahan selensen, Desa air balui, Desa batu ampar, Desa tuk jimun, Desa kemuning muda, Desa kemuning tua, Desa keritang, Desa limau manis, Desa lubuk besar, Desa sekara, Desa sekayan dan Desa talang jangkang. Dan di Wilayah Kelurahan selensen memiliki beberapa bidang kelemembagaan masyarakat yaitu, terdapat 11 RW dan 24 RT , 1 buah lembaga adat melayu (disebabkan karena masyarakat kelurahan selensen mayoritas penduduknya bersuku melayu), 1 buah karang taruna, kemudian PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).²²

Awal mulanya selensen merupakan nama dari sebuah desa kemudian berubah menjadi sebuah kelurahan sejak tahun pembentukannya yaitu pada tahun 2013 oktober, dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2013.

Kata “Selensen” itu sendiri di ambil dari nama sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yaitu sungai selensen. Sungai selensen sendiri memiliki air yang jernih dan sejuk, mengalir pelan tidak terlalu deras dan airnya cukup surut

²² Hudri, (Tokoh Masyarakat), Wawancara Tanggal 5 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak terlalu dalam untuk mencapai ke dasar sungai. Yang mana sungai tersebut di pergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan minum, mandi, mencuci dan sarana atau tempat untuk mencari ikan, udang dan fauna lainnya yg ada di sungai tersebut yang bisa di konsumsi untuk dijadikan bahan makananan atau lauk pauk sehari-hari.

Seperti sungai selensen yang begitu banyak memberi manfaat untuk orang banyak atau masyarakat sekitarnya, maka di harapkan dengan pemberian dari nama desa selensen yang di ambil dari nama sungai selensen, hendaknya juga dapat memberikan manfaat yang sama oleh desa selensen seperti manfaat yang telah diberikan sungai selensen untuk masyarakat sekitarnya. Itulah alasan mengapa selensen dijadikan nama desa dari daerah tersebut.

Semenjak desa selensen berdiri menjadi kelurahan, pemerintahan kelurahan selensen di pimpin oleh seorang kepala lurah bukan lagi dengan sebutan kepala desa. Adapun pemerintahan kelurahan selsensen yang pertama yaitu dibawah pimpinan kepala lurah yang bernama Suharta. Beliau menjabat sebagai kepala lurah dalam waktu selama 6 tahun masa jabatan, yaitu mulai dari masa jabatan tahun 2013-2019. Kemudian setelah habis masa jabatan pak Suharta, lalu beliau digantikan oleh seorang kepala lurah yang baru untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala lurah yang bernama Reski Shaputra dengan masa jabatan mulai dari tahun 2019-2025 mendatang.²³

²³ Aris, (Tokoh Masyarakat), Wawancara Tanggal 6 Februari 2021.



2. Kondisi Geografi Dan Demografi

a. Kondisi Geografi

Berdasarkan letak geografisnya Kelurahan Selensen mempunyai luas wilayah 16.000 Ha, permukaan wilayah kelurahan selensen berbentuk dataran dan perbukitan dengan kondisi tanah yang subur yang cocok untuk pertanian. Wilayah yang terdapat di kelurahan selensen terdiri dari wilayah perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan, industri kecil, industri sedang dan besar. Adapun luas dan jumlah dari masing-masing wilayah tersebut yaitu sebagai berikut²⁴:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) perladangan | : ±40 Ha |
| 2) perkebunan | : ±8000 Ha |
| 3) peternakan | : 4 Unit |
| 4) pertambangan/galian | : ±500 Ha (1 Unit) |
| 5) kerajinan | : 4 Unit |
| 6) industri kecil | : 2 buah |
| 7) industri sedang dan besar | : 2 Unit |

Daerah ini juga mempunyai iklim tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim hujan kering atau kemarau, disamping itu mempunyai curah hujan cukup. Letak Kelurahan Selensen berada di ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh ±3 menit dari pusat pemerintahan kecamatan, 120 KM dari ibu kota kabupaten dengan jarak tempuh ±3 jam dan 295 KM dari ibu kota provinsi dengan jarak tempuh ±7 jam dengan

²⁴ Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan alat transportasi darat atau angkutan darat. Adapun Letak geografis Kelurahan Selensen berbatasan dengan wilayah diantara :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan TNBT;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi.

b. Kondisi Demografi

kelurahan selensen merupakan daerah dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku. Suku yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, bugis dan banjar. Mayoritas penduduk kelurahan selensen menganut suku melayu. Suku melayu merupakan suku asli di daerah tersebut, sedangkan suku-suku lain merupakan suku pendatang yang dibawa oleh penduduk pendatang dari luar daerah kelurahan selensen.²⁵

Jika dilihat berdasarkan demografi Jumlah penduduk kelurahan selensen yaitu sebanyak 4.733 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.310, yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.303 jiwa dan perempuan sebanyak 2.281 jiwa. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. II. 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.303
2.	Perempuan	2.281
	Jumlah	4.733

Profil Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning 2020

Jumlah penduduk Kelurahan selensen dapat diketahui dari tabel di atas, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 2.303 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.281 jiwa. Jadi jumlah penduduk Kelurahan Selensen dilihat berdasarkan jenis kelamin masih banyak laki-laki dari pada Perempuan.²⁶

3. Agama

Agama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan suatu kepercayaan yang harus dimiliki dan di pegang teguh oleh setiap orang atau masing-masing individu dalam menjalankan kehidupannya. Agama berguna untuk mengatur sendi-sendi kehidupan bagi setiap manusia agar tetap menjalankan kehidupan dengan baik dan rukun, karena setiap agama manapun mengajarkan tentang toleransi sesama umat manusia agar hidup berdampingan secara damai di atas kepercayaan yang berbeda-beda.

Adapun di kelurahan selensen hanya terdapat 2 (dua) macam agama yang di peluk oleh anggota masyarakat di daerah tersebut, yaitu agama islam dan agama kristen. Masyarakat kelurahan selensen rata-rata atau mayoritas

²⁶ *Ibid.*

memeluk agama islam dan hanya beberapa orang atau beberapa kepala keluarga saja yang memeluk agama kristen. Penganut agama kristen di kelurahan selensen pun bukan dari warga asli daerah tersebut, melainkan dari warga pendatang dari luar daerah tersebut.²⁷

4. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Selensen

a. Sarana Rumah Ibadah

Sarana atau rumah ibadah adalah tempat atau wadah bagi semua umat beragama untuk melaksanakan kegiatan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Rumah ibadah selain sangat penting dalam rangka penunjang untuk pelaksanaan ibadah, kemudian juga berguna sebagai tempat untuk berkumpul suatu umat yang memegang kepercayaan yang sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran tertentu dalam konteks agama, serta untuk memupuk dan mendorong semangat beribadah pada diri seseorang. Rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti mesjid dan mushola. Perlihatkan tabel di bawah ini :²⁸

Tabel. II.2
Sarana Rumah Ibadah

NO	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	6
2.	Mushola	4
	Jumlah	10

Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning: 2020

²⁷ Bukhari, (Tokoh Masyarakat) Wawancara Tanggal 6 Februari 2021.

²⁸ Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu sebanyak 10 unit yang terdiri dari 6 mesjid dan 4 mushola.

b. Sarana Pendidikan

Pendidikan juga merpuakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga, kehipuan berbangsa, bernegara maupun beragama. Majunya suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikannya.

Adapun sarana pendidikan yg terdapat di kelurahan selensen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. II.3
Sarana Pendidikan

No	Jenis sekolah	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	1
3.	SD/MI	3
4.	SMP/MTS	2
5.	SMA/SMK/MA	3
6.	MDA	1
Jumlah		12

Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning: 2020

Sarana pendidikan di kelurahan selensen dapat kita lihat dari tabel di atas dengan jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 12 unit, yang terdiri dari: PAUD 2, TK 1, SD 3, SMP 1, MTS 1, SMA 1, SMK 1, MA 1, MDA 1. Jadi bisa dikatakan sarana pendidikan di kelurahan selensen cukup memadai.²⁹

²⁹ Ibid.

5. Sosial Ekonomi

Masyarakat Melayu Kelurahan Selensen dalam sistim sosialnya mereka menciptakan suatu kehidupan bersamaan yang begitu erat, sehingga satu sama lain saling mengawasi dan tolong-menolong jika ada yang tertimpa musibah. masyarakat Kelurahan Selensen mempunyai solidaritas yang tinggi, pada umumnya jika ada keperluan individu atau kelompok biasanya mereka saling tolong-menolong dan bergotong royong.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kelurahan Selensen mata pencahariannya beragam. Pada umumnya bekerja sebagai petani, namun selain itu ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, swasta, buruh tani, tukang, PNS, TNI/Polri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁰

Tabel. II.4
Sosial Ekonomi

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	716
2	Wiraswasta/Pedagang	154
3	Swasta	15
4	Buruh Tani	27
5	Tukang	23
6	PNS	87
7	TNI/POLRI	39

Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning: 2020

³⁰ Ibid.



B. Gambaran Umum PT. Multi Guna Lestari Abadi

PT. Multiguna Lestari Abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang produksi kelapa sawit. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2015, dan mulai beroperasi sejak 23 November 2016 dengan luas wilayah ± 38.62 Ha yang berlokasi di kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dalam pengoperasian pabrik kelapa sawit didukung oleh tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat daerah setempat dengan diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu guna meningkatkan potensi dan kualitas kerja karyawan.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dikelurahan Selensen mayoritas masyarakatnya bertani atau berkebun kelapa sawit. Pabrik dibangun didaerah jauh dari pemukiman penduduk, hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan pabrik. Seperti dampak dari kebisingan, polusi udara, limbah cair, dan lain sebagainya.

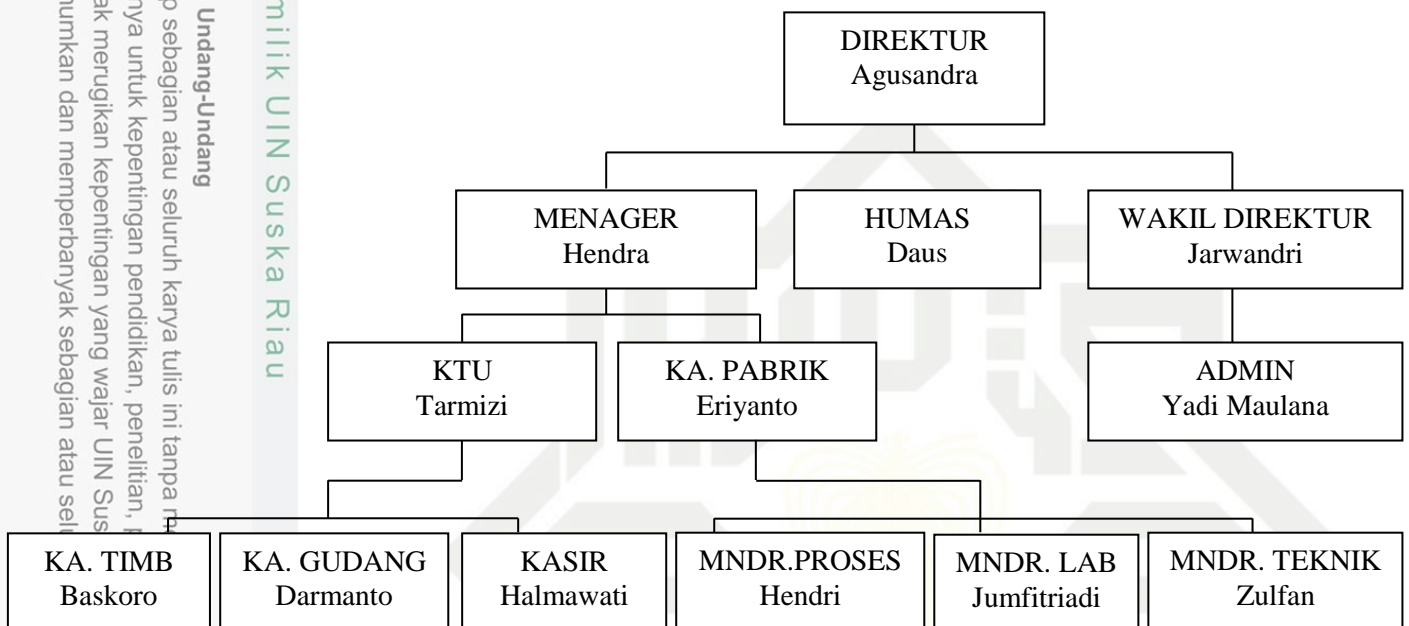
Kegiatan perusahaan pada saat ini adalah memproduksi kelapa sawit, adapun hasil dari pengolahan kelapa sawit ini adalah *Crude Palm Oil (CPO)*, Kernel, dan cangkang. Adapun jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan saat ini yaitu sebanyak 95 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 90 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.³¹

³¹ Profil PT. Multiguna Lestari Abadi.

C. Struktur Organisasi PT. Multiguna Lestari Abadi

Tabel II.1

Struktur Organisasi PT. Multiguna Lestari Abadi



Sumber Data : Profil PT. Multiguna Lestrai Abadi

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³²

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³³ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002) h. 284.

³³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*³⁴.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain³⁵ :

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret,

³⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009) h. 375

³⁵ *Ibid.* h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumns yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.³⁶

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak

³⁶ *Ibid.* h. 376



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung pada beberapa faktor, antara lain :³⁷.

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³⁸

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³⁹

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret

³⁷ 18 *Ibid.* h. 378

³⁸ *Ibid.* h. 379.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.) h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁴⁰

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁴¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa

⁴⁰ *Ibid.* h. 8

⁴¹ *Ibid.* h. 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴²

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁴³

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁴⁴

⁴² *Ibid.* h. 37

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Iffa Rohmah. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 28 November 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁴⁵

B. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu

⁴⁵ *Ibid.* h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (*reuse*) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (*recycle*) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola. Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi



Nasional Untuk Pembangunan berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3; dan
- f. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



C. Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dikenal istilah “lingkungan” yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya. Sementara dalam kamus hukum, istilah yang dikenal adalah lingkungan hidup yang artinya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah ini dikenal dalam hukum lingkungan.⁴⁷

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungann per-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁸

2. Manusia dan Lingkungan

Di alam ini terdapat organisme hidup (makhluk hidup) dengan lingkungannya yang hidup saling berinteraksi berhubungan erat tak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu sistem. Sistem tersebut disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan tingkat

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang lebih tinggi dari komunitas, yang merupakan kesatuan dari suatu komunitas yang berhubungan erat dengan lingkungannya.⁴⁹

Dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dimensi manusia adalah salah satu komponen dari ekosistem dimana eksistensi manusia memegang peranan kunci dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dalam konteks tersebut, antara manusia dan lingkungan hidup terjadi interaksi yang timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu juga manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup merupakan ruang dimana aktivitas manusia berlangsung, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.⁵⁰

3. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di peroleh pengertian asas-asas tersebut yaitu:⁵¹

⁴⁹ Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 30

⁵⁰ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 112

⁵¹ M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Makassar: Arus Timur, 2014) h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Tanggung Jawab Negara

Maksud dari asas ini yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Dalam asas ini negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.

b. Kelestarian dan Keberlanjutan

Maksud dari asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Kerasian dan Keseimbangan

Maksud dari asas kerasian dan keseimbangan ini ialah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.⁵²

⁵² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

60

d. Keterpaduan

Maksud dari asas keterpaduan yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat

Maksud dari asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Maksud dari asas kehati-hatian ini yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan.

g. Keadilan

Maksud dari asas keadilan yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara menyeluruh bagi setiap warga negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.⁵³

⁵³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Ekoregion

Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem dan budaya masyarakat setempat.

Keanekaragaman Hayati

Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.

j. Pencemar Membayar

Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Maksud dari asas partisipatif ialah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

l. Kearifan lokal

Asas kearifan lokal ini bermakna bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Asas ini menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, efisien dan keadilan.

n. Otonomi daerah

Asas otonomi daerah ini bermakna bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan keragaman daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan, transportasi, pengolahan dan pembuangan. Sistem pengelolaan limbah termasuk pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hingga pengangkutan hingga tempat pengolahan atau pembuangan akhir.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber tidak spesifik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Sumber spesifik merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Limbah dari sumber spesifik meliputi limbah dari sumber spesifik umum dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber spesifik khusus. Limbah dari sumber spesifik umum diantaranya berasal dari industri atau kegiatan sebagai sumber limbah yang menghasilkan berbagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan limbah dari sumber spesifik khusus adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah besar per satuan waktu.⁵⁷

Terkait dengan karakteristiknya yang berbahaya dan beracun, limbah B3 perlu mendapatkan penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pencegahan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan perhatian yang serius. Semua jenis aktifitas yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktifitas yang dimaksud yakni (a) pengubahan produk dengan cara penggantian jenis produk dan pengubahan komposisi produk; (b) pengendalian di sumber dengan menerapkan prosedur operasi yang baik, pengubahan bahan baku, dan pengubahan teknologi; (c) Recycling yakni limbah dikembalikan ke proses,

⁵⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan.⁵⁸

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibedakan berdasarkan karakteristiknya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi⁵⁹:

1. Mudah Meledak, jenis limbah jika terkena reaksi kimia ataupun reaksi fisika menghasilkan gas, suhu serta tekanan yang tinggi secara signifikan merubah lingkungan sekitar.
2. Mudah Menyala, untuk jenis limbah padat jika pada suhu dan tekanan 250C dan 760 mmHg, penyerapan/perubahan uap air/kimia serta ketika menyala serta dapat diketahui langsung tanpa melakukan tes laboratorium.
3. Reaktif, jika ketika keadaan normal tidak stabil yang mengakibatkan peledakan namun melalui asap, gelembung gas dan berubahnya warna.
4. Infeksius, sisa/buangan medis padat terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah yang cukup dapat menularkan dan menyebarkan penyakit pada manusia.
5. Korosif, limbah yang dapat menyebabkan iritasi dengan ditandai kemerahan dan pembengkakan.
6. Beracun, jenis limbah dengan jenis beracun sesuai uji karakteristik limbah beracun terlebih dahulu. Dapat di uji dengan Uji TCLP, Toksikologi LD 50 serta sub kronis.

⁵⁸ Trihadiningrum, Yulinah, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)*, (Yogyakarta :Teknosain, 2016), hlm 90-91

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



F. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Adapun pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya⁶⁰:

1. Pengurangan

Pengurangan adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan.

2. Penyimpanan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa bangunan harus memiliki persyaratan paling sedikit terdapat penerangan dan ventilasi serta mampu melindungi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hujan dan sinar matahari. Selain itu juga memiliki saluran drainase dan bak penampung serta terdapat alat pemadam api serta alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Sedangkan persyaratan bangunan penyimpanan harus memiliki⁶¹:

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

⁶¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan atau disimpan.
- b. Terlindung dari air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya hewan ke dalam ruang penyimpanan.
- d. Memiliki sistem penerangan yang memadai. Lampu penerangan dipasang minimum 1 m diatas kemasan dengan saklar dipasang di luar bangunan.
- e. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir
- f. Bagian luar tempat penyimpanan dilengkapi dengan simbol sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak⁶².

Untuk persyaratan tempat penyimpanan berupa tangki dan/atau kontainer yaitu :

- a. kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan limbah B3 yang akan disimpan.
- b. Kemasan harus dapat mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.

⁶² Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memiliki penutup yang kuat. Penutup tersebut menjaga agar tidak terjadi tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan.
- d. Kemasan juga harus dalam kondisi yang baik, tidak berkarat, tidak rusak, dan tidak bocor.

3. Pewadahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pengemasan harus dilakukan menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang akan disimpan. Kemasan harus dapat mengungkung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk tetap berada dalam kemasan dan memiliki penutup yang kuat. Penutup tersebut menjaga agar tidak terjadi tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Kemasan juga harus dalam kondisi yang baik, tidak berkarat, tidak rusak, dan tidak bocor. Simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penghasil dan alamatnya, waktu dilakukannya pengemasan, jumlah, serta karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁶³

⁶³ *Ibid.*,

4. Pelabelan

Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013, pelabelan berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), identitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta kuantitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilekatkan di sebelah atas simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wadah dan harus terlihat jelas. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan pada wadah wajib dilekati dengan label limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang ditampung. Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu ditangani dalam keadaan darurat.⁶⁴

Wadah yang telah dibersihkan dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau akan digunakan kembali untuk mengemas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus diberi label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), wadah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kosong. Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilekati dekat tutup wadah dengan arah panah menunjukkan posisi penutup wadah.

Simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilekatkan pada wadah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ditempel harus sesuai dengan karakteristik limbah yang ditampung.

⁶⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol B3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Simbol dilekatkan pada sisi wadah yang tidak terhalang oleh wadah lain dan mudah dilihat.
- c. Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lain sebelum wadah atau kemasan dikosongkan ⁶⁵

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan 18 penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Terdapat tiga jenis label Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah, yaitu :

- a. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan B3
- b. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3
- c. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

5. Pengumpulan

Berdasarkan Peratran Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengumpul adalah

⁶⁵ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁶⁶

Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengumpulan limbah yang dihasilkannya. Pengumpulan limbah dilakukan dengan segregasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Segregasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan sesuai dengan nama limbah B3 dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

6. Pengangkutan

Apabila tidak ditangani di tempat, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diangkut ke sarana penyimpanan, pengolahan/pembuangan akhir. Sarana pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): truk, keretaapi dan kapal. Pengangkutan dengan mengemasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam kontainer dengan drum kapasitas 200 L.⁶⁷

Untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) cair jumlah besar digunakan tanker sedangkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) padat digunakan *lugger box* dari baja. Untuk menjaga agar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditangani sesuai prosedur yang benar, harus dilakukan sejak sumber sampai ke tempat pembuangan akhir (*tracking system*). Ketika penuh, wadah yang ada di tempat penyimpanan sementara diangkut menuju pihak

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

⁶⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memiliki izin untuk pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Semua proses ini dilakukan oleh tiga pekerja yang telah dilatih untuk mengontrol, memberi label, dan manajemen dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

7. Pengolahan

Menurut Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dijelaskan bahwa pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bila penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak mampu melakukan pengolahan sendiri maka pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diserahkan kepada pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir belum efektif, karena Sungai Reth Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sungai yang terkena dampak pembuangan limbah oleh PT. Multiguna Lestari Abadi sehingga mengakibatkan banyaknya ikan-ikan yang mati, gatal-gatal bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari.
2. Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya; (i) kurangnya sarana dan prasarana; (ii) kurangnya kesadaran PT. Multiguna Lestari Abadi; (iii) kurangnya pengawasan oleh dinas terkait terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; (iv) faktor pendukung efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya; (a) memperketat



pengawasan limbah B3; (b) melakukan perbaikan terhadap sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3; (c) pentingnya pengetahuan masyarakat

B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sebagaimana yang telah di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir disarankan agar PT. atau Perusahaan harus mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dengan baik sebelum dilakukan pembuangan agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.
2. Sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab tidak efektifnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Maka kedepannya diharapkan harus lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Green Cinstitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri*, Yogyakarta: CV Andi Offcet, 2016.

Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Mr. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur, 2014.

Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982.

_____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014.

Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008.

Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Trihadiningrum, Yulinah, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)*, Yogyakarta :Teknosain, 2016.

Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bambang, Hari Prabowo, *Dasar-dasar pengolahan air dan limbah cair*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung lestari, 2019.

Andi Hamzah, *Penegakan hukum lingkungan*, Bandung: PT. Alumni, 2016

Izarul Machdar, *Pengantar Pengendalian pencemaran*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

B. Internet

Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 28 November 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

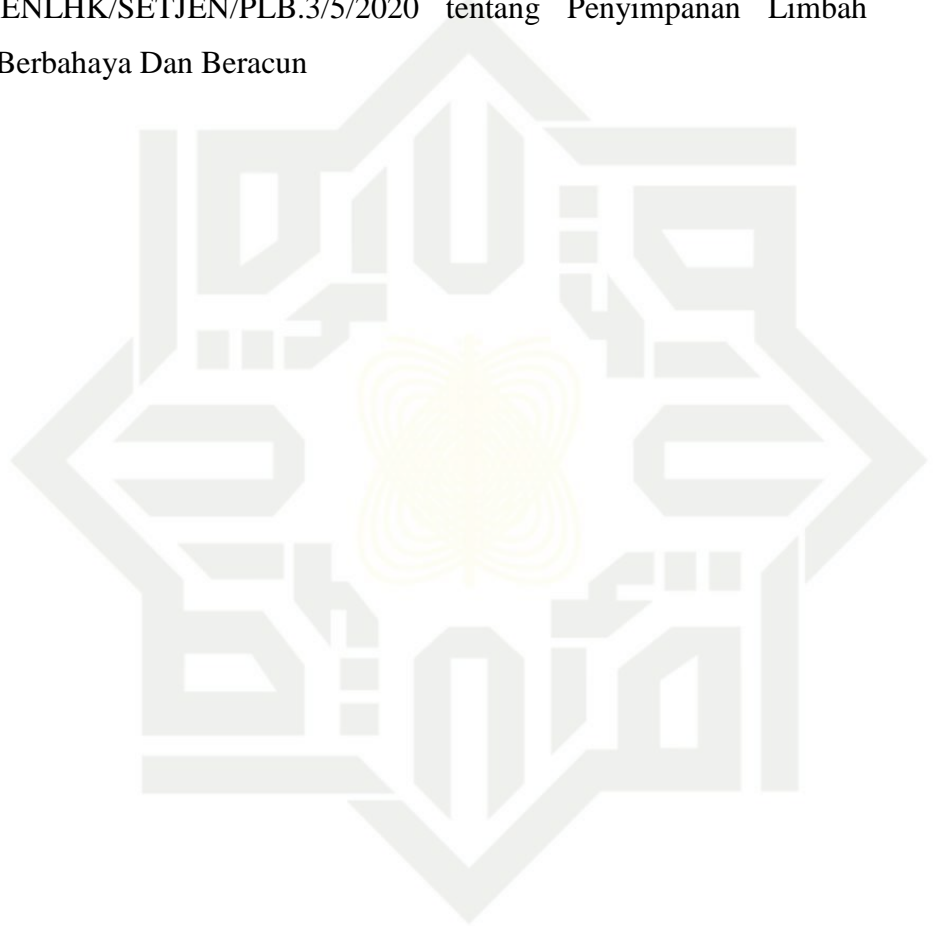
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah

Bahan Berbahaya Dan Beracun



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI
KELURAHAN SELESEN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR" yang ditulis oleh :

Nama : ALDA FITRI ANANDA
NIM : 11627203903
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Ag

Penguji II
Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalimus S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6952/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALDA FITRI ANANDA
NIM : 11627203903
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : PT. Multiguna Lestari Abadi Kel. selensen Kec. Kemuning
Kab. Indraghilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:EFETIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (STUDI di PT.
MULTIGUNA LESTARI ABADI KELURAHAN SELESEN KECAMATAN
KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ALDA FITRI ANANDA

NIM : 11627203903

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT. MULTIGUNA LESTARI
ABADI KELURAHAN SELESEN KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pembimbing: **Dr. H. MAGHFIRAH, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Kipi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39054 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37141
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6952/2020 Tanggal 4 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ALDA FITRI ANANDA |
| 2. NIM / KTP | : 11627203903 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU, JL. GARUDA SAKTI KM 2, GG. ANGGREK |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (STUDI DI PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI KELURAHAN SELESEN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/297

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37141 Tanggal 10 Desember 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ALDA FITRI ANANDA**
NIM : 11627203903
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Jl. Lintas Timur Desa Selensen Kecamatan Kemuning
Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (STUDI DI PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI KELURAHAN SELESEN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
Lokasi Penelitian : **PT. MULTIGUNA LESTARI ABADI**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2020 s/d 17 Maret 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 17 Desember 2020

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19640310 198703 1 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru